

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kenakalan remaja pada era globalisasi dewasa ini dapat dikembalikan pada upaya pendidikan itu sendiri, terutama yang mendapat sorotan adalah bagaimana implementasi proses belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang merupakan salah satu mata pelajaran inti (*core subject matters*) sehingga menjadi syarat obyektif bagi segenap warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka oleh karena itulah PPKn merupakan "*pendidikan umum*" bagi bangsa Indonesia.

Tantangan yang membenteng di hadapan para pendidik dan atau lembaga pendidikan merupakan salah satu dampak teknologi tinggi (*hight tech*). Kenyataan yang ada di tengah-tengah kita yang tidak bisa dipungkiri atau apa yang disebut dengan "*modernitas*". Hal ini membuat khawatir para pendidik dan orang tua, yakni lenyapnya jati diri bangsa Indonesia seandainya kita tidak berhasil membantu anak-anak bangsa memahami tentang inti modernitas dan tuntutan dinamika modernitas itu sendiri, dan disinilah munculnya berbagai persoalan. Apabila tidak bisa atau tidak mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam kehidupan modern maka entah apa yang

akan terjadi. Disinilah pentingnya apa yang disebut dengan "*the basics*" dalam pendidikan sebagai upaya dalam mempersiapkan anak-anak untuk mampu menjalani kehidupan (*preparing children for life*) sebagai manusia Indonesia yang memiliki jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila. Jati diri ini harus mampu berdiri di tengah-tengah derasnya arus gelombang globalisasi dunia. Kemelut yang kita hadapi bersama di dunia sekarang ini adalah kemelut tentang *ideas*, baik dalam cara hidup maupun pandangan hidup (*way of life*). Maka dari itu apa yang dapat kita sumbangkan dalam hal ini, apa konsep tentang modernitas yang sesuai dengan Pancasila, apa yang dapat kita sumbangkan untuk melahirkan suatu tata nilai (*value system*) yang relevan dengan kemelut dunia yang kita hadapi sekarang ini. Inilah tantangan global yang kita hadapi dalam kehidupan budaya. Untuk memungkinkan kehidupan yang tertib dalam masyarakat kita, ada tiga jenis tata nilai yang harus kita kembangkan, yaitu tata nilai pribadi, tata nilai kelompok, tata nilai nasional. Ketiga tata nilai ini hanya dapat terbentuk kalau kita mengadakan pemikiran yang sistematis dan mendalam mengenai jenis kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang kita kehendaki bersama.

Dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama kita, harus diupayakan memperkecil jurang antara tata nilai tektual (*textual value system*) dengan tata nilai aktual (*actual value system*).

Kenyataan memang benar dimanapun di dunia ini, kesenjangan antara dua jenis tata nilai ini selalu ada. Dengan kata lain dimanapun di dunia selalu terdapat kesenjangan antara nilai yang ditulis dengan nilai-nilai yang benar-benar diamalkan. Akan tetapi alasan ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk membiarkan keadaan yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini, sebab keadaan seperti ini akan membawa kita kearah budaya kemunafikan.

Secara umum persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan martabat bangsa kita dalam pandangan bangsa lain di dunia internasional. Bagaimana caranya meningkatkan citra kita sebagai bangsa yang di cap sebagai "*negara nomor tiga tercorup di dunia*" dapat dihapus. Bagaimana caranya agar citra bangsa yang "*etos kerjanya lembek*" dapat dihilangkan. Mochtar Buchori (2000:40). Inilah beberapa tantangan yang masih harus kita jawab dalam menegaskan kita sebagai anggota masyarakat yang bermartabat dari kehidupan global yang menjadi tugas kita dalam tahun-tahun mendatang.

Dalam pikiran penulis terdapat sebuah pertanyaan besar, "apakah pendidikan nasional kita mampu mempersenjatai bangsa kita ini, terutama generasi muda dengan perlengkapan-perengkapan moral dan intelektual yang diperlukan untuk memahami masa depan dan kemudian mengarunginya dengan bijaksana?". Pertanyaan ini timbul dengan adanya problematik nasional yang mengancam ketahanan

nasional kita, seperti ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, keberingasan sosial, arogansi intelektual, penyimpangan perilaku sosial dan gaya hidup sosial dan perubahan tata nilai. Disamping itu bahaya yang datang dari luar berupa ide-ide asing, persaingan budaya, intrusi budaya dan badai informasi. Ini semua merongrong tata nilai dan jati diri bangsa. Dan oleh sebab itu pemantapan proses transmisi tata nilai harus dilakukan, guna menegaskan identitas atau jati diri kita, baik identitas pribadi maupun kelompok dan bangsa.

Sebagai komitmen bangsa telah disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 bab II pasal 4, bahwa:

"Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan"

Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan upaya pemerintah dan segenap warga negara Indonesia. Keberhasilan (tinggi rendahnya kualitas output pendidikan) tergantung pada para pendidik/guru serta komponen lain yang terlibat di dalamnya. Dalam rangka mencapai tujuan itu maka agar lebih operasional dapat dirumuskan dalam *tujuan kurikuler, tujuan institusional dan tujuan tujuan intrusional.*

Apabila kita menyoroti *tujuan intruksional*, maka tentu berbicara juga tentang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang tentu di dalamnya terlibat antara lain adalah pendidik/guru dan peserta didik. Guru memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan kualitas pendidikan, Sedangkan pendidikan itu dikatakan berhasil manakala manusia-manusia Indonesia telah berilmupengetahuan, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan dan berperikemanusiaan, berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku, senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini rupanya yang disebut dengan warga negara yang baik (*good citizenship*).

Salah satu upaya pemerintah dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) tadi yaitu pemerintah mewajibkan kepada semua jenjang jenis pendidikan untuk menjalankan kurikulum yang berisikan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, (Undang-undang No.2/1989 pasal 39 (2)).

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan wahana dalam pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan penjelasan UU No.2 tersebut, bahwa:

"Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beranekagama kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (UUSPN No.2/1989).

Mengingat pentingnya peranan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam pembentukan manusia Indonesia maka diperlukan berbagai upaya khususnya dikalangan pendidik, bagaimana agar nilai moral Pancasila itu tertanam dalam setiap individu peserta didik sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara. Upaya penanaman nilai-moral Pancasila yang dilakukan melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diperlukan guru yang profesional. Ciri-ciri guru profesional menurut jurnal terkemuka manajemen pendidikan *Educational Leadership* edisi Maret: 1993 (Dedi Supriadi 1998:98) adalah sebagai berikut: *pertama*, guru memiliki komitmen pada siswa, yang berarti bahwa kepentingan siswa lebih diutamakan atau lebih berorientasi pada siswa (siswa sentris). *Kedua*, guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. *Ketiga*, guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa

melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai test hasil belajar. *Keempat*, guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan dalam belajar dari pengalamannya. *Kelima*, guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Dengan memperhatikan ciri-ciri guru profesional tersebut mengingatkan kita pada guru profesional khususnya bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru yang baik untuk menyajikan, menyampaikan, menerapkan pendidikan nilai moral Pancasila adalah guru yang mampu menyesuaikan Kegiatan Belajar Mengajar dengan karakteristik pendidikan nilai atau pendidikan afektif. Dalam peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai upaya baik melalui Musyawarah Guru-guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun dengan cara lain seperti penataran-penataran. Dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru, untuk bidang studi PPKn pun telah dibentuk Musyawarah Guru-guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn, baik yang diselenggarakan secara bergugus maupun secara lebih luas atau non gugus, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi kondisi suatu daerah. Esensi dari kegiatan MGMP tidak lain adalah membicarakan, mengkaji, merumuskan KBM PPKn yang seyogianya dilakukan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, implementasi

dari hasil kegiatan MGMP itu kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan, baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat umum/obyektif. Inilah sebenarnya keunikan pada guru/pendidik, sehingga dikatakan bahwa, "*guru itu harus dilahirkan bukan hanya dibentuk atau dibangun*", artinya bahwa guru itu lahir secara kodrati bukan dibangun/dibuat sedemikian rupa (berpura-pura), meskipun memang tidak sedikit lulusan perguruan tinggi dengan latarbelakang kependidikan, namun dibalik itu ada yang lebih penting untuk dimiliki oleh seorang guru, apalagi khusus untuk guru PPKn, yakni profil guu di hadapan siswa.

Jadi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar PPKn diperlukan guru yang memiliki kemampuan khusus, sehubungan dengan bidang studi tersebut memiliki karakter khusus pula, sebagaimana dikemukakan oleh A. Kosasih Djahiri (1985:19) yaitu:

"banyak para sarjana, juga guru yang beranggapan bahwa hal ihwal afektif nilai tidak bisa diajarkan, hal ini kurang benar, yang benar adalah bukan tidak bisa melainkan lebih sulit dari pada pengajaran kognitif, serta memerlukan upaya khusus, metoda khusus, serta media khusus"

Upaya khusus, metoda khusus dan media khusus inilah yang menjadi permasalahan di lapangan, artinya dengan berbagai keterbatasan dan alasan mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini tentunya akan berdampak pada



kualitas hasil pendidikan itu sendiri baik secara mikro maupun secara makro.

Untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan itu perlu diidentifikasi melalui penelitian yang terus menerus dan berkesinambungan guna diketemukan solusi-solusi yang dapat menanggulangi kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

Atas dasar beberapa pemikiran tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara kualitatif dengan judul **"KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MEMBINA SISWA MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK).**

(Studi Kasus Implementasi Kegiatan Belajar Mengajar PPKn dalam Membina Warga Negara Yang Baik di SMKN I Garut).

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *"Bagaimanakah implementasi Kegiatan Belajar Mengajar PPKn dalam membina dan mengarahkan siswa menjadi warga negara yang baik, di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)".*



Untuk memudahkan analisis hasil penelitian, maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dukungan situasi kondisi lingkungan pendidikan terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar PPKn di SMKN I Garut.
2. Pendekatan, metoda dan media manakah yang dikembangkan guru PPKn dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMKN 1 Garut.
3. Bagaimanakah profil (ciri-ciri khusus) guru PPKn di SMKN 1 Garut.
4. Bagaimanakah teknik penilaian hasil Kegiatan Belajar Mengajar yang dikembangkan oleh guru PPKn di SMKN I Garut.

Rumusan masalah tersebut di atas dilandasi oleh beberapa dasar pemikiran, yakni:

- Adanya kecenderungan para pendidik/guru tidak bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan karakteristik bidang studi PPKn, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan dan alasan baik yang bersifat obyektif maupun yang bersifat subyektif. Sedangkan salah satu yang menentukan tinggi rendahnya kualitas out put pendidikan adalah guru/pendidik itu sendiri, artinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal diperlukan pendidik/guru yang berkualitas.
- Kebutuhan yang sangat mendesak dalam pembentukan warga negara yang baik (*Good Citizenship*) di masa yang akan datang

- Upaya represif dan preventif terhadap kemerosotan moral (degradasi moral) yang kini mengkhawatirkan
- Kemajuan ilmu pengetahuan yang cepat dan arus globalisasi membuat dunia semakin sempit. Untuk itu diperlukan persyaratan baru, yakni: wawasan, orientasi, berfikir, bertindak, kemampuan dan keterampilan profesional, (H. Djamari, 1991:6)
- Adanya kecenderungan perilaku siswa yang menyimpang dari nilai-nilai moral Pancasila

2. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah pada pokok permasalahan, maka sub masalah tersebut dapat penulis jadikan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara runtun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dukungan situasi kondisi lingkungan pendidikan terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar PPKn di SMKN I Garut?.
2. Pendekatan, metoda dan media manakah yang dikembangkan oleh guru PPKn dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMKN 1 Garut?.
3. Bagaimanakah profil (ciri-ciri khusus) guru PPKn di SMKN 1 Garut?.
4. Bagaimanakah teknik penilaian hasil Kegiatan Belajar Mengajar yang dikembangkan guru PPKn di SMKN I Garut?.

C. Tujuan Penelitian

1. Secara Umum

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran Kegiatan Belajar Mengajar PPKn di SMKN I Garut dalam membina dan mengarahkan siswa menjadi warga negara yang baik, melalui berbagai pendekatan yang dikembangkannya guru PPKn, sesuai dengan karakteristik PPKn itu sendiri.

2. Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

1. Dukungan situasi dan kondisi lingkungan (fisik-nonfisik) pendidikan terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar PPKn di SMKN I Garut
2. Pendekatan, metoda dan media yang dikembangkan guru PPKn dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SMKN 1 Garut.
3. Profil (ciri-ciri khusus) guru PPKn di SMKN 1 Garut
4. Teknik penilaian hasil Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dikembangkan guru PPKn di SMKN 1 Garut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap dunia pendidikan, yaitu dalam pengembangan dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar pengajaran terutama pada bidang studi PPKn, yang menjadi pendidikan umum pada setiap jenis dan jenjang persekolahan.
- b. Membantu kita untuk memahami secara lebih mendalam terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan esensi dan program pengajaran PPKn.
- c. Sebagai bahan inspirasi bagi peneliti pendidikan selanjutnya, serta guna ditemukannya tema-tema baru, teori-teori baru yang berkaitan dengan bidang studi PPKn.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. Sumbangan pemikiran dan masukan kepada guru, khususnya guru PPKn dalam membina warga negara yang baik melalui Kegiatan Belajar Mengajar.
- b. Sumbangan pemikiran dan masukan kepada lembaga pendidikan (sekolah) untuk menciptakan situasi lingkungan pendidikan yang kondusif, positif dan konstruktif dalam membina dan mengarahkan siswa menjadi warga negara yang baik.

- c. Sebagai bahan rujukan bagi kepala sekolah atau pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan warga negara yang baik terhadap siswa.

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan tentang istilah atau kata-kata yang digunakan dalam tesis ini. Definisi itu secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdiri dari guru dan siswa sebagai komponen utamanya. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PPKn di SMKN I Garut dapat dilihat dari aspek pendekatan, metode dan media serta lingkungan pendidikan itu sendiri, baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar, tidak terlepas dari komponen pendidikan itu sendiri, karena bagaimanapun berbicara kegiatan belajar mengajar maka berbicara juga tentang konsep pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Undang et al. (1996:11) bahwa yang menjadi komponen dalam kegiatan belajar mengajar adalah: "*perumusan tujuan, metode, pelaksanaan dan penilaian keberhasilan pengajaran*". Aspek-aspek inilah yang penulis angkat dalam studi ini disamping dukungan situasi kondisi lingkungan pendidikan, sebab situasi lingkungan turut

pelaksanaan dan penilaian keberhasilan pengajaran'. Aspek-aspek inilah yang penulis angkat dalam studi ini disamping dukungan situasi kondisi lingkungan pendidikan, sebab situasi lingkungan turut memberikan warna keberhasilan atau ketidakberhasilan baik langsung maupun langsung.

2. Kegiatan belajar mengajar adalah proses terjadinya interaksi antara pendidik dengan yang dididik, antara pengajar dengan yang belajar yang dilakukan secara sadar guna mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud yakni tujuan pendidikan yang pada hakekatnya adalah tujuan kehidupan baik sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara serta sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
3. Membina adalah upaya/usaha yang berupa tindakan, ucapan, pikiran, sikap dorongan perilaku yang dilakukan guru/pendidik dan kepala sekolah, baik kegiatan yang bersifat ekstra, intra, maupun ko-kurikuler kepada peserta didik, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang salah menjadi benar, dari yang tidak bermoral menjadi bermoral
4. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar di sekolah yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai siswa.
5. Warga negara yang baik. Dalam mendefinisikan warga negara yang baik penulis bertitik tolak dari konsep "*tujuan pendidikan umum*

dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri'. Sebab pendidikan umum di Indonesia bertujuan untuk membina siswa/mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki kepribadian Indonesia yang baik. Bunyamin Maftuh, (1999:10). Berkaitan dengan warga negara yang baik, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2, menuntut perilaku warga negara yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan YME, berprikemanusiaan, beradab, mendukung persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan dan berkeadilan sosial dalam wadah Negara Yang Berdasarkan Pancasila

